

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Akuntansi sektor publik di Indonesia dalam waktu singkat berkembang secara pesat seiring dengan adanya era baru dalam pelaksanaan otonomi daerah. Undang-Undang No. 23 tahun 2014 telah dijelaskan bahwa Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam hal ini setiap kabupaten/kota memiliki kewenangan terhadap pemerintahannya.

Pada saat ini perkembangan akuntansi sektor publik, khususnya di Indonesia semakin pesat dengan adanya era baru dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah. Pengelola keuangan daerah sangat besar pengaruhnya terhadap nasib suatu daerah karena daerah dapat menjadi daerah yang kuat dan berkuasa serta mampu mengembangkan kebesarannya atau menjadi tidak berdaya tergantung pada cara mengelola keuangannya.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, kewenangan yang luas, utuh dan bulat yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi pada semua aspek pemerintahan ini, pada akhirnya harus dipertanggungjawabkan kepada pemberi wewenang dan masyarakat. Dalam rangka pertanggungjawabkan publik, pemerintah daerah harus melakukan optimalisasi anggaran yang dilakukan secara ekonomi, efisiensi, efektivitas (value for money) untuk kegiatan masyarakat. Oleh sebab itu, APBD yang pada

hakikatnya merupakan penjabaran kuantitatif dari tujuan dan sasaran pemerintah daerah serta tugas pokok dan fungsi unit kerja harus disusun dalam struktur yang berorientasi pada pencapaian tingkat kinerja tertentu Artinya, APBD mampu memberikan gambaran yang jelas tentang tuntutan besarnya pembiayaan atas berbagai sasaran yang hendak dicapai, tugas-tugas dan fungsi pokok sesuai dengan kondisi, potensi, aspirasi dan kebutuhan riil di masyarakat untuk sesuatu tahun tertentu. Dengan demikian alokasi dana yang digunakan untuk membiayai berbagai program dan kegiatan dapat memberikan manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat dan pelayanan yang berorientasi pada kepentingan publik.

Tuntutan yang tinggi terhadap kinerja dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah berujung pada kebutuhan pengukuran kinerja pemerintah daerah. Pengukuran kinerja pemerintah daerah mempunyai banyak tujuan, tujuan tersebut paling tidak untuk meningkatkan kinerja dan meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah. Untuk itu pemerintah daerah dituntut untuk mampu membangun ukuran kinerja yang baik. Ukuran kinerja yang disusun tidak hanya dengan menggunakan satu ukuran, oleh karena itu perlu ukuran yang berbeda untuk tujuan yang berbeda. Hal inilah yang kadang membuat konflik. Ukuran kinerja mempengaruhi ketergantungan antar unit kerja yang ada dalam satu unit kerja.

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang dapat kita lihat dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), menjadi salah satu Laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah yang utama karena anggaran dalam pemerintahan merupakan tulang punggung dari penyelenggaraan pemerintahan.

Anggaran memiliki peran penting dalam stabilitas, distribusi, alokasi sumber daya publik, perencanaan dan pengendalian organisasi serta penilaian kinerja. Pengukuran kinerja Sektor publik dilakukan untuk memenuhi tiga maksud, Pertama untuk memperbaiki kinerja pemerintah, ukuran kinerja dimasukkan untuk membantu pemerintah berfokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja, sehingga pada akhirnya akan meningkatkan efektivitas dalam memberikan pelayanan publik. Kedua untuk mengalokasikan sumber daya dan pembuatan keputusan. Ketiga untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.

Anggaran merupakan alat penting untuk perencanaan dan pengendalian jangka pendek yang efektif dalam organisasi. Suatu anggaran operasi biasanya meliputi waktu satu tahun dan menyatakan pendapatan dan beban yang direncanakan untuk tahun itu. Dengan anggaran manajemen dapat menentukan efektifitas dan efisiensi suatu operasi dengan membandingkan antara anggaran dengan hasil aktual (realisasi terkini) yang dicapai.

Laporan Keuangan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan.

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2019. Realisasi Pendapatan Negara sampai dengan 30 Juni 2019 adalah berupa Pendapatan

Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp.60.507.904,00. Realisasi Belanja Negara sampai dengan 30 Juni 2016 adalah sebesar Rp.17.272.612.808,00 atau mencapai 45.83 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp.37.689.372.000,00.

Tabel 1.1
Laporan Realisasi Anggaran Untuk Periode Tahun 2019

Uraian	Tahun Anggaran 2019		
	Anggaran	Realisasi	% Realisasi Terhadap Anggaran
Pendapatan Negara Dan Hibah			
- Penerimaan Negara Bukan Pajak	-	60.507.904	-
Jlh. Pendapatan	-	60.507.904	-
Belanja			
Rupiah Murni	37.689.372.000	17.272.612.808	45,83
- Belanja Pegawai	27.618.597.000	13.035.845.178	47,20
- Belanja Barang	9.636.235.000	3.812.732.630	39,57
- Belanja Modal	434.540.000	424.035.000	97,58
Jumlah Belanja	37.689.372.000	17.272.612.808	45,83

Sumber : BPKP Provinsi Sumatera Utara, Tahun 2020.

Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pemerintahan Provinsi Sumatera Utara sebagai penyelenggara sebagian kewenangan pemerintahan maupun tugas dekonsentrasi di bidang pendapatan daerah memiliki peranan yang sangat strategis yakni sebagai pengelola utama sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang digunakan mendanai belanja Provinsi Sumatera Utara, dengan berpedoman pada prinsip akuntabilitas, transparansi, efisien dan efektif. Dengan peran yang strategis ini, Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara dituntut untuk :

1. Mampu meningkatkan PAD secara terus menerus khususnya penerimaan dari Pajak Provinsi.
2. Mampu mewujudkan pelayanan prima (exelent service) dalam melaksanakan administrasi Pajak Provinsi kepada wajib pajak
3. Mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia pengelola pajak
4. Mampu mengoptimalkan kewenangan di bidang Pajak Provinsi

Pengelolaan keuangan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara menuntut akuntabilitas dan transparansi yang semakin besar dengan tetap memperhatikan asas keadilan dan kepatuhan. Prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara mutlak diperlukan guna menjamin tidak terjadinya penyimpangan yang justru merugikan masyarakat. Untuk memastikan hal tersebut, diharapkan aturan dan ketentuan pelaksanaan dan pengelolaan keuangan daerah semakain sempurna dan disajikan secara detail.

Kinerja merupakan tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam strategis *planing* suatu organisasi. Sedangkan untuk pengukuran kinerja Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara harus mencakup pengukuran kinerja keuangan dan non keuangan. Kinerja keuangan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara dapat dicapai melalui aspek ekonomis, efisiensi, dan efektivitas. Aspek ekonomis menekankan realisasi pengeluaran lebih kecil dari anggarannya,

aspek efisiensi menekankan *output* yang dihasilkan lebih besar dari *input* dan aspek efektivitas menekankan realisasi pendapatan lebih besar dari anggarannya.

Pengukuran kinerja merupakan suatu proses sistematis untuk menilai apakah program/kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan rencana tersebut, dan yang lebih penting adalah apakah telah mencapai keberhasilan yang telah ditargetkan pada saat perencanaan. Pengukuran kinerja dimulai dengan proses penetapan indikator kinerja yang memberikan informasi sedemikian rupa sehingga memungkinkan unit kerja sektor publik untuk memonitor kinerjanya dalam menghasilkan *output* dan *outcome* terhadap masyarakat. Pengukuran kinerja bermanfaat untuk membantu para pengambil keputusan dalam memonitor dan memperbaiki kinerja dan berfokus pada tujuan organisasi dalam rangka memenuhi tuntutan akuntabilitas publik.

Keterkaitan antara anggaran dan realisasi memberikan gambaran bagaimana sebuah instansi dapat dikatakan efisien atau tidak, dalam pengambilan keputusan penganggaran dan pembiayaan selama satu tahun anggaran tersebut. Dengan alat ukur berupa analisis yang didasarkan pada penggambaran yang mendukung analisa kinerja anggaran belanja. Untuk mengetahui secara langsung besarnya varians anggaran belanja dengan realisasinya yang bisa dinyatakan dalam bentuk nominal atau persentasenya berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) belanja yang disajikan terlihat sejauh mana keefektifan dan penyerapan anggaran untuk aktivitas instansi selama satu tahun anggaran tersebut. Pengukuran kinerja anggaran ini dapat menggunakan Analisis Varians Belanja.

Mengetahui seberapa besar anggaran dan realisasi terwujud dalam Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara dalam

mengelola keuangan dapat dilihat melalui seberapa besar pemenuhan pada belanja kegiatan yang digunakan oleh instansi. Misalnya dengan melihat pertumbuhan masing-masing belanja, apakah pertumbuhan tersebut rasional dan dapat dipertanggung-jawabkan dengan baik atau tidak. Pengukuran kinerjanya dapat menggunakan Analisis Pertumbuhan Belanja. Pengukuran kinerja anggaran lainnya dapat dilihat dengan menggunakan Analisis Keserasian Belanja yang bermanfaat untuk mengetahui keseimbangan antar belanja. Salah satunya adalah dengan menilai Rasio Belanja operasi terhadap Total Belanja dan Rasio Belanja modal terhadap Total Belanja. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui keseimbangan antar belanja yang menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan dananya pada belanja secara optimal. Pengukuran kinerja anggaran lainnya dapat dilihat dengan menggunakan Rasio Efisiensi Belanja

Menganalisis kinerja keuangan menjadi poin penting serta topik yang menarik untuk diteliti. Hal ini dikarenakan, dengan meneliti kinerja keuangan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara dapat diketahui hasil program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara, apakah Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara sudah baik menjalankan tugas dan fungsinya sesuai yang diamanatkan.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti terdorong untuk mengangkat permasalahan ini dalam bentuk penelitian dengan judul : **Analisis Kinerja dan Pengelolaan Anggaran Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara**”.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan penelitian pendahuluan yang telah dilakukan, maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Realisasi anggaran belum terealisasi dengan baik mengalami naik turun di setiap tahunnya hal ini disebut dengan flukkuatif.
2. Penggunaan anggaran belanja selama tahun anggaran belum efisien
3. Menggunakan anggaran belum secara optimal dalam memprioritaskan belanja

1.3. Batasan dan Rumusan Masalah

1.3.1. Batasan Masalah

Mengingat keterbatasan kemampuan analisis, biaya, waktu dan untuk memperjelas penelitian ini, maka penulis membatasi masalah ini tentang kinerja dan pengelolaan anggaran”.

1.3.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah, maka rumusan masalahnya adalah “Sejauh mana kinerja dan pengelolaan anggaran Badan Pengelolaan Pajak dan Retribisi Daerah Provinsi Sumatera Utara”

1.4. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis kinerja dan pengelolaan anggaran Badan Pengelolaan Pajak dan Retribisi Daerah Provinsi Sumatera Utara.

1.5. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi harapan dari hasil penelitian ini nantinya dapat bermanfaat antara lain:

1. Bagi akademis merupakan tambahan informasi yang bermanfaat bagi pembaca serta sebagai bahan referensi bagi peneliti lain yang tertarik pada bidang kajian yang sama.
2. Manfaat Praktis. Penelitian ini diharapkan mampu menjawab permasalahan yang ada dalam masyarakat khususnya yang berkaitan dengan kinerja pemerintah daerah dan sebagai informasi tambahan referensi dalam menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah setelah diberlakukannya anggaran berbasis kinerja.